

**RAYMOND PAUL PIERRE WESTERLING SLAUGHTER IN SOUTH  
SULAWESI EFFORT AS A STARTING THE DUTCH STATE  
INDONESIA EAST (1946-1947)**

**Rafi Zain Yusuf \*, Drs.Ridwan Melay, Hum \*\*, Bunari, M.Si \*\*\***

Email: rafizy33@yahoo.com, ridwanmelay@yahoo.com, bunari1975@gmail.com

Cp: 085272509019

*Department of Social Sciences  
History Education FKIP-Riau University  
Jl. Bina Widya Km. 12.5 Pekanbaru*

**Abstract:** *The new Indonesia gained independence should return to face the Netherlands who want to re-colonize Indonesia. NICA coming to Indonesia is trying to arm the Royal Netherlands Indisch Leger (KNIL), the Dutch royal army to Indonesia, with the aim of provocation and terror against the people of Indonesia. In addition to the military, the Netherlands is also planning to create a form of federation in Indonesia that aims to weaken the Republic of Indonesia one of which is the State of East Indonesia. But the Dutch effort to establish the State of East Indonesia should be blocked, because the situation in South Sulawesi were not safe it is caused by the people's resistance against the Dutch and Allied soldiers who refused the Dutch presence in South Sulawesi. The purpose of this study were (1) to know who Raymond Westerling, (2) to know the background of the Dutch established the State of East Indonesia, (3) to determine the people's resistance against the Dutch in South Sulawesi, (4) to determine the Dutch strategy in the face popular resistance in South Sulawesi, (5) to determine the role of slaughter Westerling of the establishment of the State of East Indonesia, (6) to find out the Dutch and Indonesian government action against the slaughter Westerling, (7) to determine the end of the State of East Indonesia. The method used is the method Historically, the data collected through technical literature and technical documentation. In analyzing the data is used dekriftif qualitative. Results from this study is that the Federal State of East Indonesia can stand, then the Netherlands need to create a safe state in South Sulawesi. To achieve this goal, then sent troops Westerling and Depot Speciale Troepen to quell popular resistance, and how that is done by Westerling is to carry out the slaughter/killing people in South Sulawesi. Westerling massacres and DST troops in South Sulawesi can extinguish the resistance of the people that made the Netherlands could be immediately set up the State of East Indonesia is the administrative center of Makassar*

**Key Words:** *Westerling, DST, NIT.*

## PEMBANTAIAAN RAYMOND PIERRE PAUL WESTERLING DI SULAWESI SELATAN SEBAGAI UPAYA BELANDA MENDIRIKAN NEGARA INDONESIA TIMUR (1946-1947)

**Rafi Zain Yusuf\*, Drs.Ridwan Melay, M.Hum\*\*, Bunari, M.Si\*\*\***

Email: rafizy33@yahoo.com, ridwanmelay@yahoo.com, bunari1975@gmail.com

Cp: 085272509019

Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial  
PendidikanSejarah FKIP-Universitas Riau  
Jl. Bina Widya Km. 12,5 Pekanbaru

**Abstrak:** Indonesia yang baru memperoleh kemerdekaan harus kembali menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. NICA yang datang ke Indonesia berusaha mempersenjatai *Koninklijk Nerderlands Indisch Leger (KNIL)*, yaitu tentara kerajaan Belanda untuk Indonesia, dengan tujuan untuk melakukan provokasi dan teror terhadap rakyat Indonesia. Selain dengan militer, Belanda juga merencanakan untuk membuat bentuk negara federasi di Indonesia yang bertujuan untuk melemahkan Republik Indonesia salah satunya adalah Negara Indonesia Timur. Namun upaya Belanda untuk mendirikan Negara Indonesia Timur harus terhalang, sebab keadaan di Sulawesi Selatan sedang tidak aman hal ini disebabkan oleh adanya perlawanan rakyat terhadap tentara Belanda dan Sekutu yang menolak kehadiran Belanda di Sulawesi Selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui siapakah Raymond Westerling, (2) untuk mengetahui latar belakang Belanda mendirikan Negara Indonesia Timur, (3) untuk mengetahui perlawanan rakyat terhadap Belanda di Sulawesi Selatan, (4) untuk mengetahui strategi Belanda dalam menghadapi perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan, (5) untuk mengetahui peranan pembantaian Westerling terhadap berdirinya Negara Indonesia Timur, (6) untuk mengetahui tindakan pemerintah Belanda dan Indonesia terhadap pembantaian Westerling, (7) untuk mengetahui akhir dari Negara Indonesia Timur. Metode yang digunakan adalah metode Historis, data dikumpulkan melalui teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan dekriftif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah agar Negara Federal Indonesia Timur dapat berdiri, maka Belanda perlu untuk menciptakan keadaan yang aman di Sulawesi Selatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Maka dikirimlah Westerling dan pasukan *Depot Speciale Troepen* untuk memadamkan perlawanan rakyat, dan cara yang dilakukan oleh Westerling adalah dengan melakukan pembantaian/pembunuhan rakyat di Sulawesi Selatan. Pembantaian yang dilakukan Westerling dan pasukan DST di Sulawesi Selatan dapat memadamkan perlawanan rakyat hal tersebut membuat Belanda bisa segera mendirikan Negara Indonesia Timur dengan pusat pemerintahan adalah Kota Makassar

**Kata kunci :** *Westerling, DST, NIT.*

## PENDAHULUAN

Indonesia yang baru merdeka setelah lepas dari penjajahan Jepang, tidak dapat menikmati kemerdekaannya. Hal ini disebabkan karena datangnya *Netherland Indies Civil Administration* (NICA), yaitu pegawai-pegawai sipil Belanda yang datang dengan menumpang pasukan Australia. Kedatangan orang-orang NICA tersebut bertujuan untuk menanamkan pengaruh serta menguasai kembali Indonesia, hal ini berdasarkan keyakinan bahwa Indonesia merupakan jajahan Belanda sebelum menyerahkan kepada Jepang dan Belanda menganggap bahwa Indonesia tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari Pemerintah Belanda. Selain itu Belanda juga tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan tidak mengakui pemerintahan yang ada di Indonesia. Belanda berkeyakinan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak cocok dengan keadaan Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan suku bangsa, Belanda menganjurkan bentuk Negara Federal lebih cocok untuk Indonesia seperti yang diterapkan oleh Inggris dan Prancis di wilayah jajahannya.<sup>1</sup>

Belanda segera mempersiapkan pembentukan negara federasi yang akan digunakan di Indonesia, maka dilaksanakanlah beberapa perundingan untuk mewujudkan rencana negara federal tersebut seperti Perundingan Hoge Veluwe, Konferensi Malino, Konferensi Pangkal Pinang, Perundingan Linggajati serta Konferensi Denpasar. Perundingan tersebut merupakan langkah yang ditempuh Belanda untuk mewujudkan bentuk negara federal di Indonesia dan hasilnya adalah berdirinya negara federal pertama yaitu Negara Indonesia Timur pada tanggal 27 Desember 1946. Namun, terdapat kendala dalam pembentukan Negara Indonesia Timur tersebut yaitu perlawanan yang terdapat di Sulawesi yang mengganggu rencana pembentukan Negara Indonesia Timur, karena pusat pemerintahan yang dipilih untuk Negara Indonesia Timur adalah Kota Makassar yang dipandang strategis namun perlawanan yang terjadi di Sulawesi khususnya Sulawesi bagian selatan membuat keadaan di Kota Makassar menjadi tidak aman. maka Belanda berupaya mengamankan keadaan di Sulawesi Selatan agar berdirinya Negara Indonesia Timur dapat berjalan lancar dengan mengirimkan Pasukan Khusus DST (Depot Speciale Troepen) dibawah pimpinan Kapten Raymond Paul Pierre Westerling untuk mengamankan dan menumpas perlawanan di Sulawesi Selatan.<sup>2</sup>

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui (1) *Siapakah Raymond Westerling* (2) *latar belakang Belanda mendirikan Negara Indonesia Timur* (3) *perlawanan rakyat terhadap Belanda di Sulawesi Selatan*. (4) *strategi Belanda menghadapi perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan* (5) *peran pembantaian Westerling terhadap berdirinya Negara Indonesia Timur* (6) *tindakan Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia terhadap pembantaian Westerling* (7) *akhir dari Negara Indonesia Timur*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif ini adalah metode penelitian yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian data, yaitu penjelasan yang menggambarkan peristiwa tersebut. Kemudian penelitian menggunakan

<sup>1</sup> Anwar, Rosihan. 1975. *Kisah-kisah Zaman Revolusi*. Hal. 89

<sup>2</sup> N. Cahyo, Agus. 2014. *Tragedi Westerling Sang Pembantai Rakyat Indonesia*. Hal. 53

pendekatan sejarah (history).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat *diperpustakaan* daerah Soeman HS, Perpustakaan Universitas Riau, Perpustakaan FKIP, Perpustakaan Sejarah, dan tempat-tempat lain yang menurut penulis dapat memberikan informasi tentang Pembantaian Westerling Di Sulawesi Selatan Sebagai Upaya Belanda Mendirikan Negara Indonesia Timur (1946-1947)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Raymond Westerling adalah seorang anggota pasukan khusus baret hijau Kerajaan Belanda. Karir Westerling di dunia militer dimulai saat Perang Dunia II, melalui pelatihan militer tingkat komando oleh Inggris, Westerling diterjunkan di medan perang Eropa untuk berperang bersama Sekutu. Setelah Perang Dunia II usai, Westerling bekerja untuk Kerajaan Belanda dan dikirim ke Medan dengan tugas untuk membebaskan tawanan Jepang di Siringgo-ringgo, setelah misi tersebut Westerling berangkat ke Jakarta untuk melatih pasukan khusus DST yang akan ditugaskan untuk kepentingan militer Belanda. Salah satu tugas pasukan DST adalah memadamkan pemberontakan di Sulawesi Selatan. Pemadaman pemberontakan yang dilakukan oleh Westerling dan pasukan DST menggunakan cara yang sangat kejam yaitu dengan melakukan pembantaian terhadap masyarakat Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Desember 1946 sampai 17 Februari 1947. Setelah melakukan aksinya di Sulawesi Selatan Westerling keluar dari dinas militer Belanda, selanjutnya Westerling mendirikan pasukan lain di Jawa Barat yang dikenal dengan APRA. Tujuan dari dibentuknya pasukan APRA yang terdiri dari orang-orang yang setia dengan Westerling adalah untuk melakukan pemberontakan terhadap Republik Indonesia dan mendukung terbentuknya Negara Pasundan yang merupakan salah satu negara federal Belanda. Bentuk pemberontakan yang dilakukan Westerling dan APRA yaitu dengan menyerang markas TNI dan mengadakan keonaran di Kota Bandung dan sekitarnya. Aksi yang dilakukan Westerling bersama APRA tidak berlangsung lama karena Pemerintah Indonesia langsung berupaya memadamkan pemberontakan tersebut dengan mengerahkan kekuatan TNI dari wilayah Jawa Barat dan Sekitarnya.<sup>3</sup> Setelah gagal melakukan pemberontakan di Jawa Barat, Westerling berupaya untuk kembali ke Belanda untuk menghindari penangkapan oleh TNI. Lolosnya Westerling keluar dari Indonesia mendapat bantuan dari militer Belanda, hal tersebut dilakukan Belanda agar Westerling tidak ditangkap dan diadili oleh Pemerintah Indonesia dan mengganggu hubungan diplomasi antara Belanda-Indonesia.

Keberhasilan Inggris dalam membentuk negara federasi di wilayah jajahannya membuat Belanda ingin melakukan hal yang serupa, yaitu membuat bentuk negara federal di Indonesia. Langkah yang diambil Belanda tersebut merupakan sebuah cara untuk melemahkan Republik Indonesia yang baru merdeka sehingga mudah untuk dikuasai mengingat apabila melakukan aksi militer maka Belanda akan mendapatkan kecaman dari dunia internasional karena walaupun Indonesia pada saat itu baru merdeka namun memiliki pengaruh yang besar dan telah mengadakan hubungan diplomasi dengan negara-negara lain maka satu-satunya cara yang tepat adalah memecah belah secara halus. Dengan bantuan Sekutu terutama Inggris dan Australia, Belanda terus

---

<sup>3</sup> Matanasi, Petrick. 2007. *Westerling Kudeta Yang Gagal*. Hal. 16

berupaya berunding dengan Pemerintah Indonesia untuk melancarkan pembentukan negara federal tersebut maka pada 23 Maret 1946 diadakan perundingan antara Inggris, Indonesia dan Belanda di Jakarta, dimana dalam perundingan tersebut H.J van Mook menyampaikan gagasan tentang pembentukan Negara Federasi Indonesia Serikat. Pada tanggal 30 Maret 1946 diadakan perundingan Hugu Veluwe yang menghasilkan keputusan Belanda mengakui wilayah Indonesia di luar wilayah yang dikuasai Belanda.

Melanjutkan rencana Belanda untuk membuat negara federal, maka pada 16-22 Juli 1946 diadakan Perundingan Malino yang dihadiri oleh perwakilan yang mendukung Belanda. Konferensi Malino menghasilkan kesepakatan untuk membuat negara federatif Indonesia dengan nama Perserikatan Negeri-negeri Indonesia. Setelah Konferensi Malino diadakan Konferensi Pangkal Pinang pada 12 Oktober 1946 dan Perundingan Linggajati pada 22 Oktober sampai 16 November 1946 yang menghasilkan pengakuan *de facto* oleh Belanda terhadap Republik Indonesia dan pembentukan negara federal dengan nama Negara Indonesia Serikat.<sup>4</sup>

Konferensi selanjutnya adalah Konferensi Denpasar yang diadakan pada tanggal 7 sampai 24 Desember 1946 yang menghasilkan keputusan pembentukan Negara Indonesia Timur dan pengangkatan Tjokorde Gde Rake Soekawati sebagai Presiden Negara Indonesia Timur dan Nadjamuddin Daeng Malewa sebagai Perdana Menteri sedangkan Tadjoeidin Noor dipilih sebagai ketua parlemen Negara Indonesia timur. Wilayah Negara Indonesia Timur meliputi 5 keresidenan yaitu, keresidenan Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Bali dan Lombok dan 13 daerah otonomi yang terdiri dari Sulawesi Selatan, Minahasa, Kepulauan Sangihe dan Talaud, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor dan Nusa Tenggara, Maluku Selatan serta Maluku Utara.<sup>5</sup>

Perlawanan rakyat Sulawesi Selatan terjadi karena sikap Pasukan Sekutu yang diwakili oleh Australia terhadap rakyat Sulawesi Selatan. Pasukan Australia yang memegang kendali di wilayah diluar Pulau Jawa dan Sumatera datang dengan membawa orang-orang NICA dan membuat kekacauan di Kota Makassar dan sekitarnya mengakibatkan kemarahan rakyat. Dalam menghadapi tekanan dari tentara Australia dan Belanda. Rakyat Sulawesi Selatan melakukan perlawanan dalam bentuk kelayakaran yang bertujuan untuk menentang usaha-usaha Belanda menguasai Sulawesi Selatan.

Perlawanan rakyat tersebut terjadi di setiap daerah di Sulawesi Selatan, karena hampir di setiap daerah terdapat kelayakaran masing-masing. Selain dengan bentuk kelayakaran terdapat juga organisasi militan pemuda yang bernama Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI) yang diketuai oleh Manai Sophiaan. PPNI bertugas untuk mengkoordinasikan organisasi perjuangan pemuda yang ada di Sulawesi Selatan. Selain PPNI terdapat juga Lasykar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS) yang menjadi ujung tombak perjuangan terbesar pemuda Sulawesi Selatan yang terbentuk pada 17 Juli 1946.<sup>6</sup>

Para pejuang di Sulawesi Selatan juga mendapat bantuan dari pemerintah pusat dengan dikirimnya pasukan Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRIPS) yang bertugas untuk membantu perjuangan rakyat dan membentuk satuan-satuan yang ada menjadi Divisi Tentara Republik Indonesia (TRI). Perlawanan rakyat Sulawesi Selatan semakin gencar dilakukan dan membuat Pemerintah Belanda terpaksa

---

<sup>4</sup> Hoesein, Rushdy. 2010. *Terobosan Soekarno Dalam Perundingan Linggajati*. Hal. 119

<sup>5</sup> Arta, Ketut Sedana. 2014. *Sejarah Indonesia Dari Proklamasi Sampai Masa Orde Baru*. Hal. 189

<sup>6</sup> Arfah, Muhammad, dkk. 1991. *Biografi Ranggong Daeng Romo*. Hal. 45

mengirimkan pasukan khusus DST di bawah pimpinan Westerling untuk memadamkannya perlawanan rakyat dan mengamankan daerah Sulawesi Selatan sehingga rencana Belanda untuk menguasai wilayah Sulawesi dapat berjalan baik. Kedatangan pasukan DST tersebut membuat perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan menjadi berkurang dan dapat dikendalikan hal tersebut terjadi karena Westerling tidak menangkap para pejuang melainkan melakukan pembantaian terhadap rakyat sehingga menimbulkan kengerian dan efek syok terapi yang membuat perlawanan menjadi berkurang.

Belanda menggunakan berbagai cara untuk menghadapi perlawanan dari rakyat Sulawesi Selatan yaitu dengan mengajak para pemuka adat, raja-raja dan tokoh masyarakat Sulawesi Selatan untuk berpihak kepada Belanda dengan janji akan diberikan jabatan dan kehidupan yang layak. Langkah yang dilakukan Belanda tersebut disebabkan rakyat Sulawesi Selatan pada dasarnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh raja-raja mereka sehingga dengan mengajak para raja dan tokoh adat tersebut secara tidak langsung juga mengajak rakyat untuk berpihak kepada Belanda. Banyak dari tokoh adat, raja-raja dan tokoh masyarakat yang menolak ajakan Belanda, namun terdapat beberapa tokoh yang memilih untuk memihak Belanda dan mengkhianati rakyat Sulawesi Selatan seperti Nadjamuddin Daeng Malewa dan Raja Mandar. Penghianatan para tokoh tersebut tentu saja membuat rakyat semakin marah.<sup>7</sup>

Selain dengan mengajak tokoh adat dan raja-raja, Belanda juga melakukan tekanan militer untuk menghadapi perlawanan rakyat. Tekanan militer tersebut selain dilakukan dengan bantuan sekutu dan tentara KNIL juga dilakukan dengan mendatangkan pasukan khusus Depot Speciale Troepen dan Westerling untuk mengatasi perlawanan tersebut. Hasilnya adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Sulawesi Selatan dan TRIPS dapat diredam walaupun tidak sepenuhnya dapat di atasi.

Pembantaian yang dilakukan oleh Westerling di Sulawesi Selatan sejatinya memang dilakukan atas perintah dari Belanda dalam hal ini yang memberikan izin kepada Westerling adalah H.J. Van Mook dan Jenderal Simon Hendrik Spoor. Kedatangan Westerling dan pasukan DST ke Sulawesi Selatan bertujuan untuk membantu memadamkan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat karena pasukan KNIL yang bertugas di Sulawesi Selatan sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi perlawanan yang ada. Pembantaian tersebut menurut Westerling dipandang perlu dilakukan sebab perlawanan yang terjadi sudah sangat meluas dan terjadi dalam skala yang besar sehingga sulit untuk dipadamkan dengan metode biasa sehingga pembantaian pun dilakukan oleh Westerling.

Pemadaman perlawanan rakyat Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Westerling dengan cara membunuh rakyat dan pejuang dilakukan Belanda untuk mengamankan daerah Sulawesi Selatan sehingga rencana Belanda untuk menjalankan Negara Indonesia Timur dapat dilakukan sebab seperti yang telah ditetapkan bahwa yang menjadi pusat pemerintahan Negara Indonesia Timur adalah Kota Makassar. Sedangkan pada saat itu keadaan di Kota Makassar dan sekitarnya sangat tidak mungkin bagi Belanda untuk menjalankan pemerintahan Negara Indonesia Timur di Sulawesi Selatan, maka untuk memadamkan perlawanan rakyat tersebut dikirmlah Westerling ke Sulawesi Selatan.

---

<sup>7</sup> Saelan, Maulwi. 2008. *Kesaksian Wakil Komandan Tjagrabirawa: Dari Revolusi 45 Sampai Kudeta 66*. Hal. 70

Mengetahui apa yang terjadi di Sulawesi Selatan pemerintah Indonesia segera melakukan tindakan penangkapan terhadap Westerling dan tentara Belanda yang terlibat dalam pembantaian tersebut. Namun, pemerintah Belanda berupaya untuk menyembunyikan Westerling dan pasukannya agar tidak tertangkap dan diadili oleh Indonesia. Langkah yang dilakukan Belanda tersebut disebabkan apabila Westerling ditangkap maka akan mengganggu hubungan diplomasi antara Indonesia-Belanda dan dunia Internasional akan sangat mengecam Pemerintah Belanda.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Belanda untuk menyelamatkan dan melindungi Westerling adalah dengan memecat Westerling dari satuan militer Belanda dan mengubah komposisi pasukan DST serta merubah nama pasukan *Depot Speciale Troepen* menjadi *Korps Speciale Troepen* (KST) lalu diubah lagi menjadi *Regiment Speciale Troepen* (RST) tujuannya adalah Westerling dan pasukan yang setia tidak ditangkap dan diadili. Belanda juga memindahkan pasukan khusus yang setia ke Papua Barat untuk selanjutnya di pulangkan ke Belanda. Selanjutnya militer Belanda berusaha untuk mengeluarkan Westerling dari Indonesia, upaya pelarian Westerling dilakukan dengan bantuan militer karena jika menggunakan operasi biasa dikhawatirkan tidak akan berhasil. Maka pada 22 Februari 1950, atas upaya Mayor Jenderal Van Langen dan Jenderal Buurman Van Vreeden, Westerling diterbangkan ke Singapura menggunakan Pesawat Catalina milik *Marine Luchtvaart Dienst* (Dinas Militer Angkatan Laut Belanda). Setibanya di Singapura Westerling ditangkap oleh Tentara Inggris, mengetahui hal tersebut Pemerintah Indonesia mengajukan permintaan agar Westerling diekstradisi ke Indonesia, namun berdasarkan keputusan dari Pengadilan Tinggi Singapura permintaan tersebut ditolak dan Westerling pun dibebaskan. Kekejaman Westerling di Sulawesi Selatan seolah luput dari hukuman hal tersebut dibuktikan dengan putusan Mahkamah Agung Belanda pada 31 Oktober 1952 yang mengatakan bahwa pengusutan atas aksi-aksi Westerling di Indonesia sudah berakhir dan tidak ada alasan untuk pengusutan lanjutan.<sup>8</sup>

Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk mengadili Westerling dan pasukannya atas apa yang telah dilakukan Westerling di Indonesia. Permintaan ekstradisi dan penahanan Westerling yang diupayakan oleh Pemerintah Indonesia selalu ditolak baik itu oleh pengadilan di Singapura maupun di Belanda. Perbuatan Westerling jelas sangat membuat pemerintah dan rakyat Indonesia marah sebab apa yang dilakukan oleh Westerling merupakan sebuah kejahatan perang yang harus dihukum seberat-beratnya.

Pertentangan dan konflik untuk menentukan bentuk negara bagi bangsa dan rakyat Indonesia tengah berlangsung. Pada satu sisi secara resmi Indonesia merupakan negara federal sebagaimana hasil dari Konferensi Meja Bundar, akan tetapi pada saat yang bersamaan timbul gerakan yang menentang keberadaan negara federal. Gerakan tersebut timbul akibat rasa tidak puas dan jiwa nasionalisme yang menghendaki bentuk negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat karena rakyat menganggap bahwa bentuk negara federal merupakan cara Belanda untuk menjajah Indonesia dan bukan keinginan rakyat.<sup>9</sup>

Namun perjuangan untuk menghapuskan sistem federal tidak bisa dilakukan dengan mudah sebab betapa pun lemahnya pendukung sistem federal tetap tidak bisa dihapuskan karena secara resmi sistem negara federal masih berdiri lengkap dengan alat-alat dan pemerintahan kenegaraannya. Maka perjuangan untuk untuk

<sup>8</sup> N. Cahyo, Agus. *Op. Cit.* hal. 117

<sup>9</sup> Sewaka. 1955. *Tjorat-Tjoret dari Jaman ke Jaman*. Hal. 171

mengembalikan bentuk negara dari federal menjadi kesatuan harus dilakukan dengan benar sehingga tidak dianggap sebagai pemberontakan.

Tindakan yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia adalah dengan mendirikan pemerintahan bayangan di negara-negara bagian tersebut mulai dari desa sampai tingkat yang lebih tinggi. Pemerintahan bayangan tersebut adalah menempatkan orang-orang yang mendukung republik di dalam pemerintahan negara federal sehingga mempengaruhi dalam segala tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah negara bagian. Dukungan untuk kembali menjadi negara kesatuan juga semakin kuat dari kalangan rakyat di negara bagian, sehingga pembentukan negara bagian tidak mendapat banyak dukungan kecuali dari Belanda sendiri.

Sebagai akibat dari dukungan rakyat dan semakin kuatnya gerakan untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia maka pemerintah negara bagian mulai melakukan upaya untuk kembali ke NKRI. Negara bagian yang pertama kembali ke Republik Indonesia adalah Negara Pasundan dan Negara Bagian Sumatera Selatan. Selanjutnya pada tanggal 7 Maret 1950 Pemerintah RIS mengeluarkan undang-undang darurat Pasal 130 Konstitusi RIS yang berisi pembubaran negara bagian dan penggabungan ke dalam Republik Indonesia. Namun kekuasaan Belanda di Negara Indonesia Timur masih sangat kuat sehingga tidak mudah bagi Pemerintah Indonesia untuk mengembalikan Negara Indonesia Timur kedalam Republik Indonesia walaupun kebanyakan anggota parlemen Indonesia Timur menghendaki untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Maka pada 19 Mei 1950 diadakan konferensi antara Republik Indonesia Serikat, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia lepas dari bentuk negara federal.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

1. Westerling adalah seorang pasukan elit Belanda yang menjadi dalang dibalik pembantaian rakyat Sulawesi Selatan serta pemberontakan APRA di Jawa Barat. Selain melakukan pembantaian dan pemberontakan di Indonesia, pasukan Depot Speciale Troepen yang dilatih oleh Westerling juga terlibat dalam berbagai aksi militer di Indonesia seperti, Agresi Militer I dan II serta membantu berdirinya Republik Maluku Selatan.
2. Latar belakang Belanda mendirikan Negara Indonesia Timur adalah untuk memecah belah Republik Indonesia yang baru merdeka. Negara Indonesia Timur termasuk ke dalam salah satu negara bagian bentukan Belanda yang dikenal dengan Republik Indonesia Serikat.
3. Perlawanan rakyat Sulawesi Selatan dilakukan dengan cara membentuk kelasykaran di setiap daerah dan berkoordinasi dengan kelasykaran pusat LAPRIS dan dibantu oleh Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRIPS) yang bertugas untuk melatih dan membina perlawanan menjadi sebuah kesatuan yang lebih baik.
4. Dalam menghadapi perlawanan di Sulawesi Selatan Belanda mengajak para tokoh adat, raja-raja dan tokoh masyarakat untuk bekerja sama dengan janji

diberikan kedudukan dan kehidupan yang layak. Selain dengan cara mengajak tokoh adat dan penguasa untuk berpihak, Belanda juga menggunakan militer untuk menghadapi perlawanan rakyat seperti mendatangkan pasukan khusus DST untuk memadamkan pemberontakan dengan cara melakukan pembantaian.

5. Untuk mendirikan Negara Indonesia Timur, Belanda memerlukan keadaan yang stabil dan aman sedangkan keadaan di daerah Sulawesi Selatan pada saat itu sedang memanas akibat perjuangan yang dilakukan oleh rakyat. Maka Belanda mengirimkan Westerling untuk memadamkan perlawanan tersebut sehingga Negara Indonesia Timur dapat berdiri.
6. Sikap pemerintah Belanda terhadap pembantaian yang dilakukan Westerling di Sulawesi Selatan adalah berusaha untuk melindungi dan menutupi tindakan Westerling dan pasukannya. Sedangkan Pemerintah Indonesia berusaha keras agar Westerling dan pasukannya dapat diadili dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
7. Negara federal yang dibentuk Belanda yang bertujuan untuk melemahkan Indonesia ternyata tidak mendapat dukungan dari sebagian besar rakyat Indonesia. Rakyat menginginkan bentuk negara federal tersebut dihapuskan dan diganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu keadaan di parlemen negara bagian juga menghendaki untuk kembali menjadi Negara Kesatuan.

## **Rekomendasi**

1. Sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya kita memahami tentang sejarah yang pernah terjadi di tanah air. Sesungguhnya peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh Westerling di Sulawesi Selatan dan daerah lainnya merupakan sebuah kejahatan perang yang harus diadili karena kejahatan perang sesungguhnya tidak ada masa kadaluarsanya dan tetap bisa di gugat oleh siapapun dan kapanpun. Walaupun pemerintah Belanda sudah mengganti rugi semua yang telah dilakukan oleh Westerling dan pasukannya tetap saja tidak bisa mengganti semua yang telah hilang.
2. Pembahasan tentang pembantaian pembantaian Westerling hingga Negara Indonesia Timur yang merupakan negara federal bentukan Belanda, penulis menyarankan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu memiliki dan menanamkan semangat nasionalisme yang besar untuk membela keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selalu menghargai jasa para pejuang yang telah gugur mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, Rosihan. 1975. *Kisah-kisah Zaman Revolusi*. Jakarta. Gramedia
- Arfah, Muhammad, dkk. 1991. *Biografi Ranggong Daeng Romo*. Ujung Pandang. Depdikbud.
- Arta, Ketut Sedana. 2014. *Sejarah Indonesia Dari Proklamasi Sampai Masa Orde Baru*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Hoesein, Rushdy. 2010. *Terobosan Soekarno Dalam Perundingan Linggajati*. Jakarta. Kompas
- Matanasi, Petrick. 2007. *Westerling Kudeta Yang Gagal*. Yogyakarta. Media Pressindo
- N. Cahyo, Agus. 2014. *Tragedi Westerling Sang Pembantai Rakyat Indonesia*. Yogyakarta. Palapa
- Saelan, Maulwi. 2008. *Kesaksian Wakil Komandan Tjagrabirawa: Dari Revolusi 45 Sampai Kudeta 66*. Jakarta. Visimedia
- Sewaka. 1955. *Tjorat-Tjoret dari Jaman ke Jaman*. Bandung. Visser